

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data, fakta serta informasi yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dari Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) untuk Kabupaten Lembata dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Namun, untuk akuntansi aset tetap masih terdapat beberapa kelemahan, diantaranya : 1) Terdapat aset tanah yang belum diketahui luasannya; 2) Terdapat pembongkaran 3 (tiga) unit gedung pada Puskesmas Lewoleba lama yang belum ada SK Penghapusan Bupati; 3) Pencatatan aset tetap yang berasal dari hibah belum tertib; 4) Tiga pekerjaan peningkatan jalan pada lokaso bukan milik pemda Lembata; dan 5) Aset tetap tanah di bawah jalan yang diperoleh sampai dengan tahun 2017 yang tersaji dalam Neraca per 31 Desember 2017 belum dicatat; 6) Aset sekolah SMA dan SMK masih tercatat dalam aset tetap.

Selain itu, pemerintah Kabupaten Lembata telah memiliki kebijakan akuntansi daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lembata Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lembata. Hasil analisis terhadap Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lembata menunjukkan bahwa di dalamnya telah mengatur batas nilai minimal untuk perolehan/kapitalisasi aset tetap jenis peralatan dan aset tetap lainnya yaitu minimal senilai Rp. 300.000,00. Namun demikian, kebijakan akuntansi tersebut belum mengatur secara jelas nilai minimal untuk perolehan/penambahan/kapitalisasi aset tetap jenis Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), melainkan hanya tertulis “seluruhnya”. Selain dari akuntansi aset tetap, hal-hal yang berkaitan dengan PSAP tidak terdapat masalah yang terjadi.

Namun tetap saja masih saja ada beberapa hal yang juga berpengaruh dalam penerapan SAP terkait dengan peningkatan kualitas laporan keuangan, diantaranya : 1) Sumber daya aparatur dalam hal ini sebagai pengelola keuangan daerah tidak semuanya berlatar belakang akuntansi atau keuangan serta kurangnya aparatur pengelola keuangan terutama pada tingkat SKPD sebagai pengelola keuangan di SKPD-nya masing-masing, 2) Kurangnya jumlah personil pengelola keuangan yang mengerti dan dapat mengoperasikan IT atau yang dikenal dengan

SIPKD dengan baik, 3) Sarana prasarana yang kurang mendukung dalam proses pengelolaan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan SAP berbasis akrual pada Badan Keuangan Daerah.

2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pengelolaan laporan keuangan berdasarkan SAP berbasis akrual, diantaranya:
 - a. Dari jumlah SDM yang terbilang masih kurang maka pemerintah Kabupaten Lembata telah melakukan perekrutan tenaga kontrak melalui beberapa tahapan tes untuk memilih orang yang berkompeten dan dapat bekerja dengan profesional untuk ditempatkan pada seluruh SKPD berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja;
 - b. Mengirim aparatur pengelola keuangan dalam mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis mengenai implementasi SAP basis akrual yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - c. Badan Keuangan Daerah sebagai pengelola keuangan daerah akan melakukan penambahan dan perbaikan atas sarana prasarana dalam menunjang pengelolaan dan penyajian laporan keuangan dengan efektif dan efisien.

6.2. Saran

Berdasarkan pengamatan pada lokasi magang serta analisis dari prespektif legalistik dan teoritis, ada beberapa upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah

daerah untuk mengatasi kendala serta meningkatkan kualitas pelaksanaan SAP berbasis akrual. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Dari perolehan Opini WDP atas Laporan Keuangan oleh BPK, pemerintah Kabupaten Lembata diharapkan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan setiap tahun atas laporan keuangan agar kedepannya kabupaten lembata dapat meraih opini WTP.
2. Pemerintah Kabupaten Lembata diharapkan untuk lebih teliti dalam melihat formasi pegawai sesuai bidang atau latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kompetensi serta kualitas dari pegawai yang ada di lingkup SKPD agar dapat mengumpulkan laporan keuangan SKPD-nya dengan tepat waktu.
3. Pemerintah Kabupaten Lembata sebaiknya melakukan berbagai kegiatan seperti pembinaan, pengawasan, pelatihan dan evaluasi kepada seluruh aparatur di tiap SKPD terutama yang mengelola keuangan agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD serta meminimalisir keterlambatan dalam pengumpulan laporan keuangan dari SKPD.
4. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana baik peningkatan kualitas ruangan serta sarana yang pendukung lainnya dalam meningkatkan pengelolaan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan SAP berbasis akrual dengan efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Kurnia. 2014. *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*. <https://skripsimahasiswa.blogspot.com/2014/03/metode-dan-tehnik-pengumpulan-data.html?m=1>
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Lembata. 2018. *Kabupaten Lembata Dalam Angka 2018*. Lembata : BPS Kabupaten Lembata.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Erlangga.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2016. *Berita Utama : BPK Memberikan Opini WDP Atas LKPD TA 2015 Pemerintah Kabupaten Lembata*. <http://kupang.bpk.go.id/?p=6510>
- Erlina, dkk. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta : Salemba Empat.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. <http://fip.um.ac.id/wp>
- Halim, Abdul. 2011. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Herwiyanti, Eliada. 2017. *Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. <http://jurnalakuntansi.petra.ac.id/index>
- Hidayat, Anwar. 2017. *Penjelasan Teknik Sampling dalam Penelitian*. <https://www.statistikian.com/2017/06/teknik-sampling-dalam-penelitian.html/amp>
- Hisbullah. 2017. *Implementasi dan Optimalisasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus pada BAPPEDA Kabupaten Gowa)*. <https://repositori.uin-alaudidin.ac.id/4970/1/HISBULLAH>
- L.A, Yuni. 2017. *Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Karananyar*. <http://eprints.iain-surakarta.ac.id>
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI.
- Marwanto. 2014. *Modul Gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akrual*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://mochram.files.wordpress.com>
- _____, Peraturan Bupati Lembata Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata

_____, Peraturan Bupati Lembata Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2014 tentang Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata.

_____, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah Kabupaten Lembata

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. 2016. *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*. Bandung : Fokusindo Mandiri.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 2011. *Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*. Bandung : Fokusmedia.

Putri, Audi. 2016. *Dampak Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah D.I Yogyakarta*.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabepa.

Setyningsih, Aminarti. 2016. *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Puskesmas dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Intervening*.

_____, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

_____, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.